

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM NEGARA HUKUM	6
A. Konsep Negara Hukum	6
B. Tindak Pidana	11
C. Pertanggungjawaban Pidana	14
D. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana	18
BAB 3 KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Korporasi	23
B. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	36
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	39
D. Pemidanaan Korporasi	58
BAB 4 HUKUM LAUT DAN PERIKANAN DI INDONESIA	65
A. Perundang-undangan tentang Kelautan dan Perikanan	65
B. Asas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan untuk Menyelesaikan Konflik Norma Bidang <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	77

BAB 5	TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA	79
A.	Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	79
B.	Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia	81
C.	Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	88
BAB 6	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA	92
A.	Kejahatan Korporasi	92
B.	Kerugian Akibat <i>Illegal Fishing</i>	97
C.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam <i>Illegal Fishing</i>	98
D.	Pemidanaan Korporasi dalam <i>Illegal Fishing</i>	101
BAB 7	KORPORASI ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA	111
A.	Korporasi Asing sebagai Pelaku	111
B.	Kendala Penegakan Hukum	114
C.	Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i>	122
D.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai Lembaga Pengawas Kegiatan Perikanan	137
E.	Pengadilan Perikanan sebagai Lembaga Penegak Hukum	145
F.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb	158
BAB 8	PENUTUP	178
	DAFTAR PUSTAKA	181
	PROFIL PENULIS	189